



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Penyaluran BLT DD Jadi Temuan BPK**

**MUKOMUKO** - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan ada sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa (DD) di Kabupaten Mukomuko. Salah satunya, BPK mendapati belum seluruh desa menyalurkan BLT DD tepat sasaran.

Padahal pagu dana untuk pemberian BLT DD di Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2021 mencapai Rp 22,4 miliar lebih. Tersebar di 148 desa, dengan total jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) mencapai 6.240 kepala keluarga.

Permasalahan lainnya yang ditemukan BPK, bahwa pendataan calon KPM yang belum optimal. Juga belum optimalnya dinas teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung pelaksanaan BLT DD.

Mengenai ini, Pelaksana Tugas (Plt)

Inspektur Inspektorat Daerah Mukomuko, Apriansyah, ST mengatakan bahwa BPK telah mengemukakan ada 3 aspek permasalahan.

"Aspek perencanaan dan penganggaran, aspek monitoring dan evaluasi serta aspek penyaluran. Dimana pada aspek ini, BPK mendapati belum sepenuhnya penyaluran tepat sasaran. Juga soal mekanisme penyaluran yang belum seluruhnya diatur secara lengkap," terang Apriansyah.

Meskipun ada sejumlah permasalahan yang jadi sorotan BPK, Apriansyah menyatakan bahwa BPK juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Mukomuko. Dengan sejumlah inovasi yang didorong dan dilakukan di Mukomuko. Diantaranya, adanya pemerintah desa yang menyalurkan BLT DD menggunakan sistem non-tunai. Dimana, BLT DD diberikan langsung kepada KPM, melalui transfer rekening bank.

"BPK mengapresiasi upaya yang

telah dilakukan Pemkab Mukomuko dalam pengelolaan BLT DD dan keberhasilan yang dicapai. Terus, yang diaudit BPK ini, penyaluran BLT DD dari tahun anggaran 2020 sampai dengan penyaluran BLT DD tahun anggaran 2021 semester I," ungkapnya.

Atas sejumlah permasalahan tersebut, BPK memberikan waktu kepada Pemkab selama 60 untuk klarifikasi serta menindaklanjuti rekomendasi BPK. "Kita punya waktu 60 hari setelah LHP diterima. Untuk menyampaikan penjelasan kepada BPK," sampainya.

Saat ini laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK sudah diteruskan Inspektorat ke Bupati Mukomuko. Untuk kemudian diterbitkan langkah tindak lanjut atau kebijakan apa saja yang akan dikeluarkan Pemkab. Guna meminimalisir salah sasaran penyaluran BLT DD berikutnya.

"Kita akan optimilasi terhadap penyaluran dan serapan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada prinsipnya, Mukomuko cukup bagus dan langkah tindak lanjut sedang berjalan," pungkasnya.

Diketahui untuk BLT DD tahun anggaran 2021, terbesar dialokasikan oleh Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman. Desa ini mendapatkan Rp 1,5 miliar lebih. Dari jumlah itu, Rp 547 juta habis dialokasikan untuk BLT. Penerimaannya mencapai 152 KPM. Disusul terbesar kedua, Desa Pernyah Kecamatan Teramang Jaya. Dengan jumlah KPM sebanyak 125 KK, dialokasikan Rp 450 juta. Terbesar ketiga, Desa Penarik Kecamatan Penarik. Pagu yang dialokasikan Rp 432 juta untuk 120 KPM.

Adapun desa yang paling kecil mengalokasikan BLT Desa yakni Desa Lubuk Selandak Kecamatan Teramang Jaya. Setahun hanya Rp 7,2 juta. Karena di musdes hanya ditetapkan 2 KPM penerima BLT Desa. (hue)